



RESHUFFLE JILID II KABINET KERJA

Dewi Sendhikasari D.*)

Abstrak

Reshuffle Jilid II Kabinet Kerja telah resmi diumumkan oleh Presiden Jokowi. Terdapat sejumlah menteri yang diganti dan ada juga yang hanya pindah posisi. Adapun 12 Menteri dan 1 (satu) Kepala BKPM telah diganti pada reshuffle kali ini. Hal ini merupakan reshuffle terbesar dibandingkan dengan reshuffle sebelumnya. Setidaknya ada 8 (delapan) nama baru yang masuk dalam kabinet. Beberapa nama berasal dari parpol, namun ada juga yang berasal dari kalangan profesional. Presiden Jokowi mengungkapkan pertimbangannya melakukan reshuffle kabinet yaitu diarahkan untuk penguatan kinerja kabinet dan memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan sekaligus dalam persaingan dan kompetisi global.

Pendahuluan

Presiden Jokowi kembali melakukan perombakan kabinet atau biasa disebut *reshuffle* kabinet. *Reshuffle* ini merupakan *reshuffle* kedua (Jilid II) pada Kabinet Kerja, setelah sebelumnya Presiden Jokowi pernah melakukan *reshuffle* pada Agustus 2015. Isu *reshuffle* telah ramai diperbincangkan beberapa bulan terakhir ini. Menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, *reshuffle* merupakan hak prerogatif presiden dan berharap dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto, juga menyatakan *reshuffle* kabinet kerja merupakan hak prerogatif presiden dan presiden telah melakukan evaluasi terhadap kinerja para menterinya. Ketua DPR, Ade Komarudin, berharap Presiden Jokowi tidak terlalu sering melakukan *reshuffle* karena khawatir para

menteri justru tidak fokus untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Politikus PDI Perjuangan, Arteria Dahlan, berpendapat bahwa *reshuffle* dinilai penting untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks saat ini. *Reshuffle* dapat menjadi bagian dari instrumen penyelesaian masalah kebangsaan yang kompleks, yang mampu membumikan nawacita dan program prioritas nasional sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais, berharap *reshuffle* yang dilakukan Presiden Jokowi membuahkan hasil dan presiden harus tegas dalam mengatur ritme kerja kabinetnya. Menurut Amien, kesuksesan kabinet ditentukan dari pola koordinasi yang dilakukan presiden ataupun wakil presiden dalam menggerakkan kinerja para menteri dan berharap *reshuffle* kali

*) Peneliti Muda Kebijakan dan Administrasi Publik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: dewi.sendhikasari@dpr.go.id



ini menjadi perombakan Kabinet Kerja yang terakhir.

Apabila diperhatikan dari komposisi keseluruhan menteri pada Kabinet Kerja hasil *reshuffle* Jilid II, terlihat masih didominasi oleh kalangan profesional, walaupun ada juga yang diisi oleh politisi. Di dalam jajaran Kabinet Kerja kali ini, masuk beberapa wajah baru yang berasal dari kalangan partai politik, yakni Asman Abnur yang berasal dari PAN sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi, Wiranto yang merupakan Ketua Umum Hanura sebagai Menko Polhukam, Eko Putro Sandjojo dari PKB sebagai Menteri Desa dan PDTT, Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem sebagai Menteri Perdagangan, dan Arilangga Hartarto dari Partai Golkar sebagai Menteri Perindustrian.

Walaupun kemudian muncul anggapan bahwa *reshuffle* kabinet kali ini sebagai akomodasi bagi koalisi parpol, namun Juru Bicara Presiden, Johan Budi, mengatakan bahwa perombakan ini dalam rangka untuk mempercepat pembangunan dan bukan karena kepentingan partai. Presiden Jokowi juga berharap perombakan kabinet ini bisa mendorong terbukanya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, juga meyakini bahwa dengan adanya perombakan ini, Kabinet Kerja akan menjadi lebih kuat dan kompak.

Reshuffle juga dianggap sebagai salah satu cara presiden dalam mengevaluasi kinerja para menterinya. Dua kali *reshuffle* kabinet kerja dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, tergolong cepat. Apalagi jika melihat dari lama waktu kinerja para menteri tersebut dalam menjalankan program kerjanya. Oleh karena itu, bagaimana *reshuffle* jilid II Kabinet Kerja ini dan apakah dampak *reshuffle* terhadap kinerja kelembagaan kementerian?

Reshuffle Jilid II Kabinet Kerja

Tantangan politik pertama yang dihadapi oleh presiden terpilih pada hari-hari pertama adalah pembentukan kabinet, khususnya dalam menentukan format jumlah dan komposisi kabinetnya. Dalam menentukan format kabinet tersebut, presiden terpilih dapat menentukan pilihannya, di antaranya: *Pertama*, apakah format kabinet pada pemerintah akan lebih dipengaruhi oleh bentuk koalisi yang akan dibangun oleh partai pengusung presiden dan partai lain di legislatif untuk menjamin kelancaran program kerja presiden. *Kedua*, presiden terpilih akan membentuk suatu kabinet

kerja yang terdiri dari para profesional yang ahli di bidangnya untuk mengatasi persoalan bangsa yang mendasar. Atau *ketiga*, presiden terpilih perlu membentuk suatu kabinet yang mayoritas terdiri dari para profesional dan para fungsionaris partai untuk memimpin penyelenggaraan bidang utama program presiden.

Presiden Jokowi pada awal pemerintahannya telah membentuk Kabinet Kerja dengan komposisi 34 Kementerian, sesuai dengan batas maksimal yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Presiden mempunyai hak prerogatif dalam menentukan siapa menteri-menteri yang akan membantunya dalam kabinet. Menurut John Locke (1689), hak prerogatif adalah kekuasaan tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum menurut keputusan sendiri untuk kebaikan publik. Walaupun dalam pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara tetap diatur dalam undang-undang sebagaimana disebutkan juga dalam Pasal 17 UUD 1945. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan presiden tidak tak terbatas karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang.

Reshuffle kabinet adalah kebijakan untuk merombak komposisi kabinet yang sudah berlangsung. Perombakan kabinet dilakukan, baik dengan mencopot jabatan menteri tertentu maupun dengan menggesernya ke jabatan yang lain. Perombakan kabinet biasanya dilakukan atas dasar kinerja para menteri, menanggapi kritik publik, skandal tertentu yang menimpa menteri bersangkutan, atau karena pertimbangan politis. *Reshuffle* kabinet dilakukan oleh presiden sehubungan dengan fungsinya sebagai kepala pemerintahan yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menterinya.

Walaupun *reshuffle* kabinet merupakan hak prerogatif presiden, namun evaluasi kinerja bisa dijadikan bahan pertimbangan presiden dalam menilai baik buruknya kinerja para menterinya dalam kabinet. Adapun sebelum *reshuffle* dilakukan, Presiden Jokowi telah memanggil sejumlah menteri dalam rangka finalisasi evaluasi kinerja menteri. Seperti yang disampaikan Juru Bicara Presiden, Johan Budi, bahwa presiden terus melakukan evaluasi kinerja menteri yang dijadikan dasar dalam *reshuffle* kabinet.

Adapun nama-nama menteri dan Kepala BKPM pada *reshuffle* Kabinet Kerja Jilid II ini adalah:

1. Menko Maritim: Luhut Binsar Panjaitan;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas: Bambang Brodjonegoro;
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN: Sofyan Djalil;
4. Kepala BKPM: Thomas Trikasih Lembong;
5. Menko Polhukam: Wiranto;
6. Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati;
7. Menteri Desa dan PDTT: Eko Putro Sandjojo;
8. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi;
9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendy;
10. Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukita;
11. Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto;
12. Menteri ESDM: Arcandra Tahar; dan
13. Menteri PAN-RB: Asman Abnur.

Pelantikan menteri baru hasil *reshuffle* Jilid II tersebut diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P/2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia 84/P/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Presiden mengungkapkan pertimbangannya melakukan *reshuffle* kabinet yaitu diarahkan untuk penguatan kinerja kabinet dan memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global dan sekaligus dalam persaingan dan kompetisi global. Presiden Jokowi mewanti-wanti agar kabinet yang baru dapat bekerja lebih keras lagi dalam upaya menyejahterakan rakyat. Presiden Jokowi berharap kabinet baru juga dapat bekerja lebih cepat, progresif, bekerja dalam tim yang solid, dan saling mendukung dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Dampak *Reshuffle* Kabinet

Reshuffle Jilid II Kabinet Kerja dilakukan 11 bulan sejak pergantian menteri pada *reshuffle* Jilid I yang dilakukan pada 12 Agustus 2015. Dorongan kekuatan politik besar dan sentimen negatif pasar nampaknya menjadi faktor utama Presiden Jokowi melakukan *reshuffle*. Karena diadakan ketika belum genap setahun dari pergantian menteri sebelumnya, kesan bahwa *reshuffle* kali ini agak terburu-buru tidak bisa dihindari. Selain itu, kesan ini mengisyaratkan adanya hal-hal yang mendesak. Terlebih lagi

ketika terjadi perubahan koalisi, yaitu masuknya dukungan dari PAN dan Partai Golkar ke dalam pemerintahan sehingga muncul asumsi publik bahwa *reshuffle* hanya sekedar mengakomodasi kepentingan koalisi tersebut. Walaupun komposisi menteri tidak hanya dari kalangan politisi tetapi juga dari kalangan profesional.

Namun demikian, dari *reshuffle* Jilid II tersebut dapat dilihat bahwa perubahan terbesar yaitu pada menteri-menteri di bidang perekonomian. Hal ini sejalan dengan keinginan presiden untuk memperkuat sektor perekonomian. Beberapa isu ekonomi yang menjadi perhatian utama adalah tentang pembangunan perbatasan, maritim, infrastruktur, dan penguatan anggaran. Dengan digantinya menteri-menteri di bidang perekonomian, antara lain Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri ESDM, Menteri Perindustrian dan Kepala BKPM, diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan adanya *reshuffle* kabinet tersebut yang mana terjadi pergantian pimpinan kementerian, pasti akan berdampak pada kinerja kementerian dan lembaga itu sendiri. Hal ini juga terkait pada pola dan gaya kepemimpinan masing-masing menteri yang berbeda-beda yang dikhawatirkan dapat menghambat kinerja kementerian dalam pelaksanaan program kerjanya.

Kinerja kementerian dan lembaga tidak pernah terlepas dari sosok menteri yang memimpinnya. Oleh karena itu, peran menteri sangat penting dalam meningkatkan kinerja institusi yang dipimpinya. Berbagai persoalan di tingkat kementerian dan lembaga baik internal maupun eksternal yang terjadi seperti lemahnya koordinasi antar menteri dinilai telah menghambat kinerja kementerian dan lembaga itu sendiri. *Reshuffle* juga akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan para menteri pada institusinya masing-masing. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjadi masalah ketika tidak sejalan dan sinergi dengan kebijakan menteri sebelumnya. Hal ini tentunya akan mengganggu pelaksanaan program kerja yang sedang berjalan.

Selain itu, koordinasi antarmenteri merupakan salah satu hal yang penting dalam membina hubungan antar-kementerian.

Dengan koordinasi yang baik, akan melancarkan pelaksanaan program kerja kementerian terutama pada kementerian dalam satu jalur koordinasi. Selama ini, koordinasi dan hubungan baik para menteri menjadi sorotan terkait persoalan kegaduhan kabinet yang sempat terjadi di tubuh kabinet. Hal ini juga terkait dengan masih adanya ego sektoral masing-masing kementerian dengan kewenangannya masing-masing sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, kekhawatiran yang muncul akibat *reshuffle* kali ini dapat diatasi apabila para menteri yang baru ini mampu memperbaiki kondisi dan berbagai persoalan yang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan dengan saling membina hubungan baik antar-kementerian melalui koordinasi dan kerjasama yang baik. Kebijakan-kebijakan dalam kementerian yang muncul pasca-*reshuffle* ini juga diharapkan mampu menekankan pada skala prioritas sehingga program kerja dapat berjalan dengan tepat. Monitoring dan evaluasi kinerja seluruh instansi pemerintahan juga diperlukan guna memperbaiki kinerja demi meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Penutup

Reshuffle Jilid II pada Kabinet Kerja merupakan langkah yang diambil Presiden Jokowi dengan segala pertimbangannya demi meningkatkan kinerja pemerintahan terutama kepercayaan publik terhadap pemerintahannya. Publik hanya menginginkan kinerja para menteri yang bisa menghasilkan dampak yang positif terhadap kepentingan rakyat. Oleh karena itu, dengan komposisi kabinet kerja hasil *reshuffle* Jilid II ini diharapkan mampu memperbaiki berbagai persoalan yang muncul dan berkembang, terutama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dukungan DPR sebagai lembaga legislatif dengan fungsi pengawasan dan juga sebagai mitra kerja Pemerintah diharapkan dapat mendorong kabinet dalam proses peningkatan kinerja ke depannya.

Referensi

- Sofian Effendi. 2010. *Reformasi Tata Kepemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 87.
- Ikhsan Darmawan. "Reshuffle dan Ancaman Koalisi Tambun". *Koran Tempo*, Senin 1 Agustus 2016.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Ant. "Setnov Puji Sikap Hati-Hati Jokowi Terkait Reshuffle Kabinet". <http://news.okezone.com/read/2016/07/19/337/1441134/setnov-puji-sikap-hati-hati-jokowi-terkait-reshuffle-kabinet>, diakses 1 Agustus 2016.
- Bagus Prihantoro Nugroho. "Jokowi Umumkan Reshuffle Kabinet: Harus Lebih Cepat, Solid, dan Saling Dukung". <http://news.detik.com/berita/3262257/jokowi-umumkan-reshuffle-kabinet-harus-lebih-cepat-solid-dan-saling-dukung>, diakses 1 Agustus 2016.
- Elvan Dany Sutrisno. "Jokowi Evaluasi Kinerja Menteri, Reshuffle Kabinet di Depan Mata". <http://news.detik.com/berita/3259856/jokowi-evaluasi-kinerja-menteri-reshuffle-kabinet-di-depan-mata>, diakses 1 Agustus 2016.
- Jabbar Ramdhani. "Amien Rais Berharap Reshuffle Kabinet Berbuah Kerja Nyata". <http://news.detik.com/berita/3263115/amien-rais-berharap-reshuffle-kabinet-berbuah-kerja-nyata>, diakses 29 Juli 2016.
- Marieska Harya Virdhani. "Soal Reshuffle, PDIP: Presiden Jokowi Akan Berhati-hati". <http://news.okezone.com/read/2016/07/20/337/1442882/soal-reshuffle-pdip-presiden-jokowi-akan-berhati-hati>, diakses 1 Agustus 2016.
- Ray Jordan. "Seskab: Komposisi Keseluruhan, Kalangan Profesional Tetap Banyak di Kabinet". <http://news.detik.com/berita/3262432/seskab-komposisi-keseluruhan-kalangan-profesional-tetap-banyak-di-kabinet>, diakses 1 Agustus 2016.
- Riko Syarudin. "Hak Prerogatif Presiden di dalam UUD 1945". http://www.academia.edu/9543497/Hak_Prerogatif_Presiden_didalam_UUD_1945 diakses 1 Agustus 2016.
- "Apa itu Reshuffle Kabinet?" <http://www.selasar.com/politik/reshuffle-kabinet>, diakses 1 Agustus 2016.
- "Ketua DPR Minta Jokowi Tak Sering-sering "Reshuffle" Kabinet". <http://nasional.kompas.com/read/2016/07/18/19002871/ketua.dpr.minta.jokowi.tak.sering-sering-reshuffle.kabinet>, diakses 1 Agustus 2016.